

## BAB II

### PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU MAIN HAKIM SENDIRI

#### A. PENGERTIAN MAIN HAKIM SENDIRI

Main hakim sendiri merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*Eigenriching*” yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa pengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Selain itu main hakim sendiri adalah istilah dari tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai dengan hukum.<sup>25</sup> Perbuatan main hakim sendiri selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran hak – hak orang lain dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa ada indikasi rendahnya terhadap kesadaran hukum.<sup>26</sup>

Pengertian tindakan main hakim sendiri menurut Sudikno Mertokusumo adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang – wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepetingan, sehingga akan menimbulkan kerugian.<sup>27</sup>

Tindakan main hakim sendiri merupakan respon masyarakat yang malah menciptakan suasana tidak tertib. Masyarakat yang seharusnya

---

<sup>25</sup><http://library.ikipgrismg.ac.id/docfiles/fulltext/513ceb52d8ca03ab>, diakses pada tanggal 07 April 2018 pukul 17.00 WIB

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, hlm.167

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm.03

menaati hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh penguasa bertindak sebaliknya, mereka melakukan suatu respon terhadap adanya kejahatan dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana. Akan tetapi apabila dilihat dari pengertian tindak pidana yang telah diuraikan diatas maka akan tampak jelas bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh masyarakat dengan dipukuli sampai babak belur bahkan sampai dengan membakarnya hidup – hidup merupakan suatu bentuk lain dari kejahatan.

Main hakim sendiri sama halnya dengan kerumunan yang berlawanan dengan norma – norma hukum (*lawless c'rowds*). Menurut Soerjono Soekanto kerumunan yang berlawanan dengan norma – norma hukum (*lawless c'rowds*) terbagi dua, yaitu:

1. Kerumunan yang bertindak emosional (*acting mobs*), kerumunana semacam ini bertujuan untuk mencapai suatu tjuan dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma – norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pada umumnya, kumpulan orang – orang tersebut bergerak karena meresahkan bahwa hak – hak mereka diinjak – injak atau tidak adanya keadilan.
2. Kerumunan yang bersifat immoral (*immoral crowds*), contohnya adalah seperti orang – orang yang mabuk.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grapindi Persada, Jakarta, 1990, hlm.161

Terjadinya main hakim sendiri karena orang – orang tersebut merasa sepenanggungan, seperasaan, dan merasa saling memerlukan anggota masyarakat yang satu dengan yang lain, sehingga ketika diketahui adanya pelaku tindak pidana dan tertangkap langsung berdasarkan emosi tanpa pikir panjang masyarakat bertindak menghakimi pelaku pidana tersebut (*eigenrichting*).

Perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian merupakan fakta yang sering terjadi dalam masyarakat. Masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri diproses secara hukum, karena perbuatan main hakim sendiri telah melanggar ketentuan pidana.<sup>29</sup> Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>30</sup> Sebagai negara hukum tentu saja mampu mewujudkan supermasi hukum sebagai salah satu syarat negara hukum.

Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 4 yang berbunyi:<sup>31</sup>

“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak – hak

---

<sup>29</sup> <http://repository.unib.ac.id/8854/1/I,II,III,II-14jul.FH.pdf>, Diakses pada tanggal 07 April 2018, Pukul 18.00 WIB

<sup>30</sup> Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>31</sup> Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Kemudian dalam Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“setiap orang berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawai, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya”.

Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 33 Ayat (1) Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana apabila kedua Pasal tersebut kita simpulkan bahwa perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum dan melanggar hak asasi manusia.

## **B. PENGERTIAN TINDAK PIDANA**

Tindak pidana adalah tindakan yang dinilai melanggar ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHPidana), maksudnya adalah bila ada seseorang yang melakukan tindakan melanggar hukum maka orang tersebut dapat dikenai salah satu pasal dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHPidana). Pelanggaran adalah tindakan menurut hukum yang berlaku tidak boleh dilakukan misalnya melakukan tindakan pencurian/ perampokan.

Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaar*

*feit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata untuk menterjemahkan *strafbaar feit* oleh sarjana – sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana, *delict*, dan perbuatan pidana.<sup>32</sup>

Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan”, sedang “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan “*strafbaarfeit*” itu diterjemahkan sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>33</sup>

Mengenai definisi tindak pidana dapat dilihat pendapat pakar – pakar antara lain menurut *Vos*, *delik* adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang – undang. Sedangkan menurut Van Hamel, *delik* adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak – hak orang lain. Menurut Simons, *delik* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh Undang – undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum. Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah ancaman (sanksi)

---

<sup>32</sup> Ismu Gunaidi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2009, hlm.36

<sup>33</sup> Lamintang, P.A.F, *Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cipta Aditya Bakti , Bandung, 1997, hlm.181

yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>34</sup>

Sementara itu, Moeljanto menyatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita – citakan oleh masyarakat.<sup>35</sup>

#### Unsur – unsur Tindak Pidana

Tindak Pidana bukan sebatas aturan yang memuat sejumlah larangan dalam bentuk undang – undang yang memuat sanksi – sanksi yang akan diterima oleh para pelanggarnya. Adapun unsur – unsur tindak pidana ini, dibedakan menjadi dua yaitu unsur tindak pidana dari sudut *teoritis* dan tindak pidana dari sudut undang – undang.

Tindak pidana *teoritis* adalah tindakan atau perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang karena bertentangan dengan hukum yang berlaku. Rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum. Unsur – unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumus yang dibuatnya. Unsur – unsur tindak pidana menurut beberapa ahli, antara lain sebagai berikut:

Menurut Moeljanto unsur – unsur tindak pidana sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Ismu Gunaidi dan Jonaedi Efendi, 2009. *Op. Cit.*, hlm.37

<sup>35</sup> Bassar, M.S. *Tindak – tindak Pidana Tertentu*, Ghalia, Bandung 1986, hlm.74

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangnya)

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dan *strafbaar feit*.<sup>36</sup>

Unsur objektif antara lain:

- 1. Perbuatan orang
- 2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- 3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “di muka umum”

Unsur subjektif antara lain:

- 1. Orang yang mampu bertanggungjawab
- 2. Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*)

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, yang melarang adalah aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk tindak pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar – benar dipidana. Pengertian diancam pidana adalah pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

---

<sup>36</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradya Paramita, Jakarta, 1987, hlm.338-339

Buku II Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHPidana) memuat rumusan – rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkahlaku/ perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan) unsur kesalahan dan melawan hukum kadang – kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur – unsur lain, mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHPidana) ini, dapat diketahui adanya unsur tindak pidana yaitu:

- a. Tingkah laku
- b. Melawan hukum
- c. Kesalahan
- d. Akibat konstitutif
- e. Keadaan yang menyertai
- f. Syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- g. Syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Objek hukum tindak pidana
- j. Kualitas subjek hukum pidana
- k. Syarat tambahan untuk memperingan pidana



### C. MACAM – MACAM TINDAK PIDANA

Tindak pidana umum ini ialah suatu tindak pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat dalam Buku II tentang Kejahatan dan Buku III tentang Pelanggaran, sedangkan tindak pidana khusus diatur di luar KUHPidana.

Berkaitan ini, pelaku tindak pidana kejahatan dapat dikatakan telah mempunyai latar belakang yang ikut mendukung terjadinya kriminalitas tersebut, sebagai contoh seorang yang hidup dilingkungan yang rawan akan tindak kriminal, maka secara sosiologis jiwanya akan terpengaruh oleh keadaan tempat tinggalnya.<sup>37</sup> Selanjutnya menurut Sue Titus Reid bagi suatu perumusan tentang kejahatan maka yang diperhatikan adalah :

1. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*omissi*). Dalam pengertian ini seseorang dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan . Jika terdapat suatu keajaiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu, disamping itu ada niat jahat (*“criminal insert”, ”mens rea”*).
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
3. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.

---

<sup>37</sup> Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cipta Aditya, Op.cit., hlm.184.

4. Diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, pada dasarnya kejahatan adalah suatu bentuk perbuatan dan tingkah laku yang melanggar hukum dan perundangundangan lain serta melanggar norma sosial sehingga masyarakat menentanginya. KUHP tidak memberikan definisi secara tegas tentang pengertian kejahatan. Namun dalam kaitanya dengan kejahatan dapat disimpulkan bahwa semua perbuatan yang disebut dalam buku ke- II Pasal 104 – 488 KUHP adalah kejahatan dan perbuatan lain secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan dalam undang-undang di luar KUHP.<sup>38</sup>

Dalam KUHP yang mengatur tentang pelanggaran terdapat dalam Pasal 489-569/BAB 1- IX. Pelanggaran adalah “*Wetsdelichten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian. Maka pembunuhan, pencurian, penganiayaan dan peristiwa-peristiwa semacam itu merupakan kejahatan (*Rechtsdelicten*) karena terpisah dari aturan pidana yang tegas, dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil. Sedangkan peristiwa seperti bersepeda diatas jalan yang dilarang, berkendara tanpa lampu atau kejurusan yang dilarang merupakan kejahatan undang-undang/pelanggaran (*Wetsdelicten*), karena kesadaran hukum kita tidak menganggap bahwa hal-hal itu dengan sendirinya dapat dipidana, tetapi baru dirasakan sebagai demikian, karena

---

<sup>38</sup> *Ibid.* hlm.186.

oleh undang-undang diancam dengan pidana. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut :

- a. Kejahatan adalah criminal onrecht dan pelanggaran adalah politie onrecht. Criminal onrecht adalah perbuatan hukum sedangkan Politie onrecht merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Adapula pendapat lain yang mengatakan arti Criminal onrecht sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan oleh Tuhan atau membahayakan kepentingan hukum, sedangkan arti politie onrecht sebagai perbuatan yang pada umumnya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang oleh peraturan penguasa atau negara.
- b. Kejahatan adalah memperkosa suatu kepentingan hukum seperti : pembunuhan, pencurian, dan sebagainya atau juga membahayakan suatu kepentingan hukum dalam arti abstrak misalnya penghasutan dan sumpah palsu, namun kadang-kadang dapat pula dikatakan bahwa sumpah palsu juga termasuk sebagai suatu kejahatan.
- c. Kejahatan atau pelanggaran itu dibedakan karena sifat dan hakekatnya berbeda, tetapi ada perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas ukuran pelanggaran itu dipandang dari sudut kriminologi tidaklah berat apabila dibandingkan dengan kejahatan.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

Tindak Pidana Khusus Tindak Pidana Khusus adalah suatu tindak pidana yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Pidana dasar pemberlakuan tindak pidana khusus di dalam KUHP diatur dalam Pasal 103, yaitu :

”Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain,”

Misal: Tidak Pidana Korupsi (UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tidak Pidana Korupsi), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Terorisme, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, kejahatan terhadap anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak), Pelanggaran HAM (Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia). Tindak pidana khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut undangundang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya bahkan hukum acaranya sebagian diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut dan secara umum tetap

berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>40</sup>

Unsur-unsur Tindak Pidana merupakan inti dari pada sifat melawan hukum adalah perbuatan, karena perbuatan itulah yang hanya diikuti oleh unsur-unsur opzetnya. Van Hammel merumuskan unsur-unsur *strafbaar feit* yaitu :

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang.
- b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.
- c. Dilakukan dengan kesalahan oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab baik sengaja maupun tidak sengaja.

Sedangkan menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan manusia.
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*).
- c. Perbuatan itu harus diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*) oleh undang-undang.<sup>41</sup>
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*Toerekeningsvat baar*).
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah perbuatan manusia yang melawan hukum

---

<sup>40</sup> Syamsuddin Azis, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.30.

<sup>41</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I A - IB*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990/1991, hlm.3.

dan dapat diancam dengan pidana baik disengaja ataupun tidak disengaja yang terjadi karena kesalahan sipembuat.